

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bagian penting dari sistem negara demokrasi adalah pemilu. Negara yang menerapkan sistem demokrasi memandang pemilu sebagai indikator utama keberhasilan demokrasi, karena melalui proses inilah demokrasi dapat berjalan. Pemilu menjadi bukti bahwa kekuasaan yang dimiliki lembaga eksekutif dan legislatif berasal dari rakyat dan mendapat legitimasi dari mereka. Pengakuan rakyat ini sangat penting karena memberikan landasan bagi berjalannya birokrasi pemerintahan dalam mengambil kebijakan dan mewujudkan aspirasi masyarakat. Selain itu, dengan adanya pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan siapa yang akan memegang kendali pemerintahan, menjadikan suatu negara layak disebut sebagai negara demokrasi.

Indonesia memiliki tingkat demokrasi yang tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh sistem pemilihan warga negara dan pemimpin yang diatur undang-undang. Hal ini merupakan manifestasi konkret dari partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat yang menjadi sumber utama demokrasi di Indonesia. Pemilu 2024 akan menjadi perhatian utama di berbagai media, baik online maupun offline, karena tingginya antusiasme masyarakat Indonesia setiap kali pemilu digelar. Namun, Pemilu 2024 akan menjadi pemilu yang unik karena untuk menandai awal mula Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak guna memilih anggota legislatif, eksekutif, dan kepala daerah. Pemilu 2024 juga menjadi wadah partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pemimpin dan perwakilan mereka. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif sangat diperlukan untuk membangun hubungan harmonis antara pemegang kekuasaan dan masyarakat.

Pemilih pada Pemilu 2024 memiliki peran strategis dalam menentukan hasil pemilu. Namun, tantangan seperti apatisisme politik, minimnya edukasi pemilu, dan pengaruh politik transaksional masih menjadi kendala yang signifikan. Studi menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dapat ditingkatkan melalui pendekatan komunikasi yang sesuai dengan karakteristiknya, seperti penggunaan media sosial, konten yang kreatif, dan pendekatan interaktif yang dapat membangun kepercayaan dan keterlibatan aktif (Elidar Sari, 2024). Oleh karena itu, strategi

komunikasi KPU harus mempertimbangkan aspek-aspek tersebut untuk menciptakan pesan yang relevan dan menarik bagi berbagai generasi pemilih.

Kota Malang sebagai pusat pendidikan dan budaya di Indonesia memiliki potensi besar dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan populasi pelajar yang signifikan, pendekatan komunikasi berbasis masyarakat dan integrasi dengan lembaga pendidikan dapat menjadi langkah yang strategis. Selain itu, pemetaan media yang paling sering digunakan oleh masyarakat di Malang dapat membantu KPU mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif. Fokus ini tidak hanya relevan secara lokal tetapi juga memberikan model yang dapat diterapkan di daerah lain.

Komunikasi yang efektif sangat berperan dalam membangun hubungan harmonis antara pemimpin dan masyarakat. Ruben, sebagaimana dikutip oleh (Arni, 2005), menyatakan bahwa komunikasi selalu melibatkan interaksi dengan orang lain dalam berbagai konteks atau bidang. Proses komunikasi tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mengandung elemen persuasif agar pihak lain dapat menerima pemahaman tertentu serta menjalankan saran, perintah, atau ajakan. Ketika komunikasi tidak berlangsung dengan baik, hal ini dapat mengganggu aktivitas sebuah kelompok atau organisasi. Pernyataan ini menggambarkan bahwa komunikasi adalah elemen yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari di mana mereka terus berinteraksi dan berkomunikasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang efektif untuk mencegah kesalahpahaman dalam kehidupan sosial.

Untuk mewujudkan komunikasi yang efektif, diperlukan strategi komunikasi yang efisien, mirip dengan pendekatan dalam strategi bisnis pada umumnya, yang bertujuan untuk menetapkan dan menyampaikan visi serta misi organisasi melalui sistem yang terarah sesuai dengan tujuan dan kebijakan utama. Strategi memberikan panduan arah yang didukung oleh pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Tidak hanya dalam bisnis, strategi juga diperlukan dalam organisasi atau kelompok. Oleh karena itu, strategi komunikasi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh komunikator dengan tujuan tertentu untuk menyampaikan pesan kepada penerima sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Ini meliputi pemilihan media, penyusunan pesan, serta prediksi efek yang akan timbul. Menurut (Effendy, 2007), strategi pada dasarnya berhubungan dengan perencanaan dan pengelolaan operasionalnya. Strategi komunikasi harus mencakup semua aspek yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan masyarakat atau target audiens. Pendekatan ini

memungkinkan masyarakat mendapatkan manfaat yang relevan, sekaligus memastikan target dapat dijangkau dengan lebih luas dan efektif.

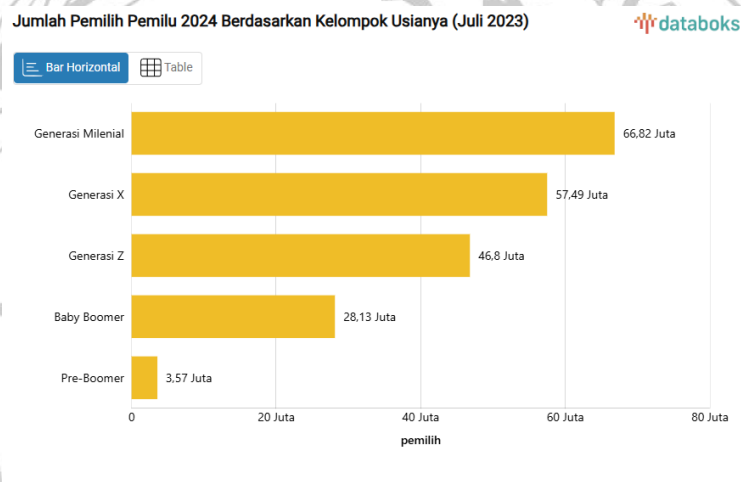
Dalam konsep demokrasi, masyarakat memegang peran sentral dalam kekuasaan negara (M. Riyanto, 2023). Demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat menjadikan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih sebagai tolok ukur keberhasilan demokrasi, sekaligus menggambarkan tingkat partisipasi politik di suatu negara. Partisipasi politik sendiri merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam proses politik yang memiliki dampak nyata terhadap kehidupan mereka. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu menjadi perhatian utama bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah, karena tingginya partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator keberhasilan pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemilu dipercaya oleh masyarakat dan memberikan legitimasi politik yang kuat bagi pemerintahan yang dihasilkan (Dayati, 2019). Penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi bukti konkret adanya demokrasi dalam sistem pemerintahan negara ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa pemilu adalah wadah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD. Pemilu diselenggarakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatan mereka sekaligus mewujudkan demokrasi (Alifia Silvi Fatiha, 2022).

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, diperlukan keterkaitan antara kehendak rakyat dengan praktik pemerintahan yang dijalankan oleh elit politik. Oleh sebab itu, setiap warga negara yang telah dewasa dan memenuhi syarat hukum diberikan hak untuk memilih wakilnya di Parlemen. Untuk menjamin bahwa pemilu mencerminkan aspirasi masyarakat, undang-undang pemilu memberikan sejumlah perlindungan hukum. Pasal 198, misalnya, menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, atau yang sudah menikah, memiliki hak untuk memilih. Selain itu, Pasal 12 mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU, yaitu mengoordinasikan, menyelenggarakan, memantau, dan mengawasi seluruh tahapan pemilu.

Menyelenggarakan pemilu yang berkualitas bukanlah tugas yang mudah. Banyak aspek yang perlu dipersiapkan, dilaksanakan, dan diawasi dengan cermat.

Beragam pihak terlibat dalam proses ini, baik yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak. Selain itu, berbagai tantangan, baik teknis maupun non-teknis, harus diatasi. Oleh sebab itu, diperlukan keberadaan lembaga yang independen, profesional, dan akuntabel untuk menyelenggarakan pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. KPU memiliki kantor di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang dikenal sebagai KPU Daerah dan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, KPU juga memiliki perwakilan di tingkat kecamatan dan desa, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dalam menjalankan tugasnya, KPU bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, peserta pemilu, masyarakat, media, dan lembaga pemantau pemilu.



Gambar 1. 1 Data Jumlah Pemilih Pada Pemilu 2024 Berdasarkan Kelompok Usia

Seiring dengan berlangsungnya tahapan pemilu 2024, KPU Pusat telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) yang mencatatkan total 204.807.222 pemilih. Berdasarkan hasil rekapitulasi, sebagian besar pemilih pada pemilu 2024 berasal dari generasi milenial (lahir 1981-1996) dengan jumlah 68.822.389 orang, serta generasi Z (lahir 1997-2012) yang mencapai 46.800.161 orang (databoks.katadata.co.id, 3 Agustus 2023). Kedua generasi ini termasuk kelompok pemilih terbesar yang akan menggunakan hak pilih mereka pada pemilu 2024. Pemilu 2024 akan menjadi pemilu pertama yang diikuti oleh Generasi Z, yang sebagian besar merupakan pemilih pemula. Karena mereka belum pernah menggunakan hak pilihnya dan cenderung apatis terhadap politik, prospek partisipasi mereka dalam pemilu 2024 menjadi hal yang menarik untuk diamati. Kedua kelompok ini adalah generasi yang paling produktif, dan

dengan jumlah yang signifikan, partisipasi mereka akan sangat memengaruhi arah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi KPU untuk merumuskan strategi komunikasi yang tepat dalam memberikan informasi dan edukasi terkait pemilu 2024, guna melibatkan pemilih mayoritas ini.

Selain itu, terdapat tantangan akibat besarnya jumlah pemilih pada Pemilu 2024, seperti permasalahan administrasi KTP elektronik, pemilih baru rentan terhadap politisasi, pemilih baru masih labil dan apatis terhadap politik, pemilih baru rentan terhadap politik transaksional, serta pemilih baru belum berpengalaman dalam mengikuti kegiatan pemilu (www.kpu.go.id, 14 Juli 2022). Berkaca dari hal tersebut, strategi komunikasi KPU harus mampu mengatasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu, seperti kendala administrasi, waktu, sumber daya manusia, anggaran, koordinasi, dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Strategi Komunikasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024 di Kota Malang." Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi komunikasi yang diterapkan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Kota Malang. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang komunikasi pelayanan publik, serta memberikan masukan dan rekomendasi yang berguna bagi KPU dan pihak terkait lainnya untuk menyelenggarakan pemilu yang lebih baik di waktu depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: "Bagaimana strategi komunikasi pelayanan publik yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Kota Malang?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana strategi komunikasi pelayanan publik yang diterapkan oleh KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa kegunaan penelitian ini adalah:

- 1 Tujuan akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan dokumentasi yang berguna bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji Strategi Komunikasi Pelayanan Publik, sehingga menjadi pembelajaran yang relevan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa ilmu komunikasi dalam melakukan penelitian sejenis.

- 2 Tujuan Praktis

Peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan data yang berguna untuk memberikan kontribusi penting bagi semua pihak dalam memahami partisipasi politik pemilih, serta memberikan manfaat bagi banyak pihak yang terkait.

